BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan seabagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

> Dalam hal Kesejahteraan, Sunarti (2006: 5) menyatakan bahwa "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat".

Dari kutipan diatas kita bisa memahami bahwa Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2008).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

> “Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchashing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008:41 dalam Widyastuti 2012:3).

Soetomo (2014: 47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang

mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tenteram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan kenyamanan, terlindungi, bebas dari rasa takut termasuk menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi juga rohani.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesemapatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2018 :8).

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dapat dipahami melalui kutipan dibawah ini.

> Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan

> ketimpanagan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan keadaan kehidupan di masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012: 115).

Dengan demikian hal ini pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

A. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama, adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya :

a. Adanya persedian sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus di perhatikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat diselesaikan dengan cepat.
c. Pelaksanan usaha meningkatkan kesejahteraan harus bersifat

demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan di dalamnya.

d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negative bagi masyarakat , tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak positif bagi masyarkat (Asriyah, 2007:18).

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mecapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Ada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial danmenurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Status kesejahteraan dapat diukur sesuai proposisi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000: 23). Rumah tangga bisa dikategorikan sejahtera jika proposisi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya, rumah tangga dengan proposisi pengeluaran kebutuhan pokok lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran kebutuhan bukan pokok dapat

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada 14 kriteria dalam menentukan keluarga dan rumah tangga kategori miskin seperti jenis lantai, luas bangunan, fasilitas MCK, dinding, sumber air minum, sumber penerangan, frekuensi mengkonsumsi daging, jenis bahan bakar memasak, ayam dan susu, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan berobat, pendidikan kepala keluarga, luas lahan usaha tani, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai paling sedikit Rp. 500.00,-, seperti sepeda motor kredit/non kredit, kapal, emas, motor, ternak, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin tidak sejahtera.

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Menurut BKKBN, tingkat kesejahteraan suatu keluarga dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu.

1) Keluarga pra sejahtera, ditunjukkan dengan tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar pada Keluarga Sejahtera I.
2) Keluarga sejahtera I (kebutuhan dasar), ditunjukkan dengan anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan makan dua kali sehari atau lebih; memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, sekolah maupun bepergian;

kondisi tempat tinggal beratap, berlantai dan dinding yang baik; kemampuan individu membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan.

3) Keluarga sejahtera II (kebutuhan psikologis), ditunjukkan dengan anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama; makan daging/ikan/telur paling tidak seminggu sekali; memperoleh satu stel pakaian baru paling tidak setahun sekali; luas lantai rumah paling tidak 8 m2 untuk tiap penghuni rumah; keluarga dalam keadaan sehat dalam tiga bulan terakhir; ada anggota keluarga yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan; seluruh anggota keluarga (usia 10-60 tahun) dapat membaca tulisan latin; pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.
4) Keluarga sejahtera III (kebutuhan pengembangan), ditunjukkan dengan adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama; menabung sebagian pendapatan dalam bentuk uang maupun barang; kebiasaan makan bersama keluarga paling tidak seminggu sekali untuk saling berkomunikasi; mengikuti kegiatan masyarakat; mendapatkan informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi maupun internet.
5) Keluarga sejahtera III Plus (aktualisasi diri), ditunjukkan dengan memberikan sumbangan materiil secara sukarela dan rutin untuk kegiatan sosial; ada anggota keluarga yang aktif dalam kepengurusan

perkumpulan masyarakat.

Dengan demikian di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2006:3)

Adapun menurut Imron (2012:30), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomi keluarga berupa tabungan (Imron 2012:30).

1. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif

Setiap orang harus bekerja untuk menghasilkan pendapatan, penerimaan melebihi pengeluaran. Pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menabung. Rakyat yang mampu menabung merupakan tahapan pemberdayaan yang paling mendasar.Mereka yang bisa menabung diidentifkasi sebagai mereka yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu menabung untuk keperluan masa depan atau investasi yang lebih luas

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah. Semakin besar pendapatan yang di peroleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tingginya pendapatan yang di dapatkan maka akan semakin meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

2. Peningkatan Kesehatan Keluarga

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesejahteraan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak deskriminatif dalam pelaksanaanya. Kesehatan menjadi indikator melalui mampu tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang di butuhkan.

Bidang kesehatan merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah. Pada level Sulawesi Barat kesehatan merupakan salah satu Strong Point

Pembangunan Daerah. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.

Pada tahun 2020, jumlah sarana kesehatan di Sulawesi Barat sebanya 9 Rumah Sakit,1 Rumah Sakit Bersalin,16 Poliklinik, 98 Puskesmas, 337 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 59 Apotek. Dengan keberadaan saranak esehatan ini diharapkan seluruh penduduk di Sulawesi Barat dapat terjangkau seluruhnya dengan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi yang tinggal di daerah yang cukupj auh dari daerah perkotaan.

Namun, ternyata pada tahun 2020 sesuai dengan data BPS Provinsi Sulawesi Barat terdapat 58,52 persen penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tetapi tidak berobat jalan. Ironisnya,ada sekitar 1,07 persen penduduk yang tidak punya biaya berobat; 0,87 persen penduduk yang tidak ada biaya transportasi; dan 0,29 persen tidak ada sarana transportasi untuk berobat jalan. Untuk dapat meningkatkan kesehatan dan standar hidup masyarakat ada empat indikator yang digunakan, yaitu status gizi, status penyakit, status ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.

3. adanya investasi ekonomi keluarga berupa tabungan

Di negara-negara maju, masyarakat pada umumnya telah terbiasa

menabung di bank, tetapi secara umum menabung tidak harus di bank. Masyarakat di negara maju sudah terbiasa dengan bank. Mereka tidak segan berurusan dengan bank dalam segala hal berkaitan dengan keuangan. Pembayaran gaji kepada karyawan pada umumnya langsung dikirim ke rekening karyawan di bank. Warga masyarakat pun membayar cicilan rumah, rekening listrik, telepon, air, gas biaya kesehatan, dan lain-lain pembayaran melalui bank. Demikian pula pembayaran pajak dilakukan melalui bank. semakin banyak warga masyarakat kita menabung di bank. Banyak bank juga berusaha memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama diwilayah pedesaan, agar mereka menabung uangnya di bank.Kini mereka mulai lebih sering berurusan dengan bank. Tabungan masyarakat di bank amat penting untuk meningkatkan pembangunan, terutama bidang perekonomian.Manfaat atau pentingnya tabungan masyarakat bagi pembangunan, antara lain sebagai biaya hidup sehari-hari, membantu sesama masyarakat, peningkatan modal usaha, jaminan hari tua dan bela negara membayar pajak (Sumodoningrat, 2016:149)

2. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil dapat didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda, yang dapat mencakup jumlah karyawan, jumlah penjualan atau pendapatan, dan/atau jumlah aset atau modal yang dimiliki bisnis. Standar klasifikasi untuk setiap kriteria juga dapat berbeda sesuai

dengan sektor atau industri mana bisnis beroperasi. Karena itu, ekonomi dapat menggunakan kombinasi kriteria, dan berbagai standar untuk memenuhi kriteria tersebut, untuk menentukan apakah suatu perusahaan tertentu diklasifikasikan sebagai UMKM. Berbagai lembaga dalam suatu ekonomi juga mungkin berguna untuk mendefinisikan UMKM secara berbeda untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif yang diarahkan untuk UMKM. Oleh karena itu, definisi UMKM dapat bervariasi bahkan dalam suatu perekonomian. Mengingat bahwa definisi UMKM mencerminkan karakteristik ekonomi yang mendasarinya,tidak mengherankan bahwa definisi UMKM bervariasi secara substansial di seluruh dunia. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha

kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:

a) Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
b) Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
c) Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan atara 500 juta sampai

10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

2. Ciri Khas UMKM

UMKM tidak saja berbeda dengan Usaha Besar, tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, profil dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku dan modal,lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha (Tabel 1)

Tabel 1
Ciri Khas Utama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
di Negara-Negara Berkembang

No.	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beroperasi di Sektor informal; Usaha tidak terdaftar; tidak / jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di Sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang membayar pajak	Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi & Manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal(ILD), Manajemen & Stuktur organisasi Formal (MOF), Sistem pembukuan formal (ACS)	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS.	Banyak yang mengerjakan Manajer Profesional dam Menerapkan ILD, MOF, ACS.
3	Sifat dari Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggta keluarga tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji	-semua memakai TK yang di gaji -semua memiliki perekrutan yang formal
4	Pola / Sifat dari Proses Produksi	Deraja mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah	Beberapa memakai mesin-mesin terbaru	Banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi/ punya akses terhadap teknologi yang tinggi
5	Orientasi Pasar	Umunya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas
6	Profil Ekonomi & Sosial dari Pemilik Usaha	Pendidikan rendah & dari rumah tangga (RT) miskin; Motivasi utama : *Survival*	Banyak berpendidikan baik & dari RT Non Miskin; banyak yang bermotivasi bisnis/ mencari profit	Sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur; motivasi utam : profit
7	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses kredit formal	Banyak yang memakai bahan baku impot dan punya akses kredit formal
8	Hubungan-hubungan Eksternal	Kebanyakn tidak punya akses ke Program2 pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan Usaha Besar	Banyak yang punya akses ke Program-program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan Usaha Besar	Sebagian besar punya akses ke Program-program pemerintah dan punya hubungan
9	Wanita Pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari wanita terhadap proa sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari wanita terhadap proa sebagai pengusaha sangat Rendah

Sumber : Tambunan (2016:16)

3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk mengetahui tentang usaha kecil dan menengah ada bebrapa kriteria yang bisa di jadikan acuan, adapun kriteria yang termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut.

a. Bahan baku mudah di peroleh
b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukannya alih teknologi.
c. Keterampilan dasar yang umumnya telah dimiliki secara turun temurun.
d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
e. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor.
f. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

4. Permasalahan UMKM

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antar pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah :

a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan

lembaga keuangan. Penyertaaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.

b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya one man show, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
d. Akses informasi usaha yang masih rendah.
e. Belum berjalin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
f. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya
g. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas dan tidak menentu arahnya.

Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM. Masyarakat juga membutuhkan kemudahan dalam berhubungan dengan instansi atau pejabat yang memberikan pelayanan yang

dibutuhkan.

B. Definisi Konsep

Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Usaha Mikro dan Kecil dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Kesehatan Keluarga, adapun definisi konsep tentang ketiga hal diatas adalah sebagai berikut :

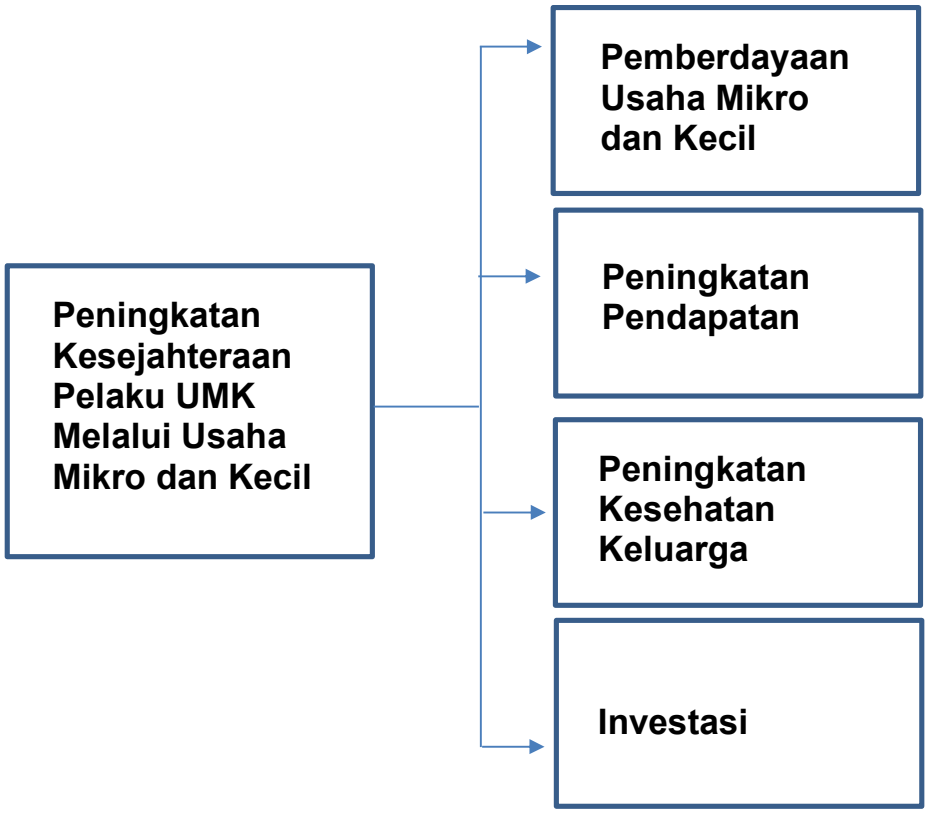
1. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil ialah bagaiamana Usaha Mikro dan Kecil bisa menjadi sumber penggerak perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan Pendapatan adalah sejauh mana Masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya melalui Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Barat
3. Peningkatan Kesehatan Keluarga adalah sejauh mana masyarakat bisa mencegah penyakit dan memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Barat
4. Investasi / Tabungan adalah sejauh mana masyarakat bisa berinvestasi atau menabung untuk biaya hidup sehari-hari, membantu sesama masyarakat, peningkatan modal usaha, jaminan hari tua dan bela negara membayar pajak melalui Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Barat.

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibangunlah sebuah model konseptual yang akan diuji hubungannya melalui penelitian ini. Adapun model yang dikonstruksi sebagai kerangka penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 8.

Gambar 8

Kerangka Penelitian



Sumber : Imron (2012:30)